**ANALISIS FAKTOR PEMBEGALAN DAN UPAYA
PENEGAKAN HUKUM SERTA PENANGGULANGANNYA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENGADILAN NEGERI
MEDAN**

Chandra Fhutu Neva¹, Thariq Al Fajri², Anzani Syafrilia³, Kholijah Halimah
Pane⁴, Ahmad Zidan Renggali⁵

^{1,2,3,4,5}*Prodi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Islam Sumatera Utara*

Email : Chandra@fkip.uisu.ac.id¹, thariqalfajri07@gmail.com²,
anzanisyafri37@gmail.com³, kholijahpane3@gmail.com⁴,
zidanazr2004@gmail.com⁵

ABSTRACT

The increase in theft crimes is still a problem in the city of Medan. Robbery is a crime committed by a group of people by stealing goods or committing violence that can cause the victim to be injured. This research focuses on the study and analysis of Medan District Court decisions, with the aim of identifying the factors that cause criminal acts of theft, as well as evaluating aspects of law enforcement and efforts to overcome them. This research was carried out using a literature study approach through analysis of books, articles and scientific journals that are relevant to the research topic. Through a study of decision number 768/Pid.B/2024/PN Mdn, this research reveals the dynamics behind this crime, as well as formulating preventive and rehabilitative steps that have been and can be taken to minimize similar cases in the future.

Keywords: *Law Enforcement, Burglary, Medan District Court, Crime.*

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja (Rianto 2012). Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, ekonomi, budaya dan sebagainya. Belakangan ini banyak

kasus kejahatan yang ramai terjadi di kehidupan masyarakat. Hal ini cukup menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat untuk beraktifitas. Dari sekian banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat satu diantaranya adalah berupa kejahatan yang disertai dengan kekerasan. Kini kejahatan

tersebut mulai banyak terjadi di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan menempati posisi sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Menurut Teguh Setyabudi, Direktur Jendral Dukcapil Kemendagri, Jakarta Pusat (7/8/2024) mengatakan, bahwa jumlah penduduk Indonesia semester satu 2024 (berjumlah) 282.477.584 jiwa. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan beribu kota di Kota Medan dan sekaligus sebagai salah satu provinsi penyumbang dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, tercatat tahun 2024 penduduk yang ada di wilayah Sumatera Utara sebanyak 15.471.582 jiwa dengan kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera utara memiliki jumlah penduduk terbanyak se-sumatera utara, yaitu sebanyak 2.536.271 jiwa.

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa kota Medan memiliki

jumlah penduduk yang signifikan. Sebagai kota yang memiliki penduduk yang banyak tentu kota Medan memiliki tantangan besar dalam mengatur warganya dari aksi kejahatan. Maraknya kejahatan yang disertai dengan kekerasan seperti pembegalan sangat meresahkan dan membahayakan bagi masyarakat kota Medan. Maka dari itu pemerintah daerah, kepolisian, pihak keamanan, serta masyarakat turut andil dalam menyikapi tindakan kejahatan pembegalan motor tersebut. Salah satu alternatif menanggulangi perilaku kejahatan begal adalah dengan cara menggunakan hukum pidana untuk menindak setiap pelakunya. Dimana hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Mengutip pernyataan dari (Bonger 1982) mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Maraknya tindakan kriminalitas sering kita jumpai di berbagai daerah, salah satunya di Kota Medan. Telah Banyak kasus dan laporan tentang terjadinya pembegal sepeda motor khususnya di kota Medan. Kasus pembegalan banyak meresahkan masyarakat karena pada umumnya kejahatan ini dilakukan pada malam hari. Seperti kasus pembegalan yang telah terjadi di kota Medan pada tanggal 04 Januari 2024. Dimana dalam kasus ini pelaku yaitu Ichal Adhitya alias Ichal, Ibrahim Chandra Syam alias Baim dan temannya yang berjumlah kurang lebih 40 orang melakukan tindakan kekerasan pembegalan menggunakan senjata tajam yaitu clurit. Kejadian ini berlangsung di jalan Datuk Kabu kel. Denai, kec. Medan Denai, Kota Medan. Korban yang bernama Muhammad Andika mengalami luka parah mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada saat kejadian itu berlangsung teman korban

sebenarnya melihat kejadian tersebut. Namun, teman korban memilih menghindar dari kejadian tersebut dikarenakan pelaku pembegalan membawa senjata tajam berjenis clurit dan rombongan pelaku berjumlah lebih banyak dari pada rombongan korban. Pelaku begal ini melakukan tindak pidana karena telah membuat keresahan terhadap warga sekitar khususnya keluarga korban. Dari kejadian tersebut pelaku pembegalan bersama rekan-rekannya tertangkap oleh pihak kepolisian karena adanya laporan dari pihak teman korban sekaligus sebagai saksi kejadian tersebut.

Bahwa dari kasus tersebut penanggulangan kejahatan memiliki banyak perspektif. Oleh karena itu, tujuan serta kebijakan dalam penanggulangan ini termasuk kedalam perlindungan masyarakat untuk mencapai keamanan, kedamaian, ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait kejahatan begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok Kepolisian antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Tindakan pembegalan masih menjadi suatu masalah di negeri ini, teror bagi masyarakat membuat masyarakat takut untuk keluar rumah. Berbagai cara pun telah dilakukan untuk memberantas aksi begal. Pada dasarnya aksi ini didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya kesulitan dalam masalah ekonomi, dan penyalahgunaan narkoba. Dalam kejadian demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-sebab kejahatan, dan mencari cara penanggulangan kejahatan.

Upaya menanggulangi kejahatan pembegalan dapat

dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dan Undang-Undang yang mengaturnya untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban serta keamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembegalan dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dan pemerintahan kota Medan dalam penegakan hukum dan penanggulangan kasus pembegalan.

Dalam membahas kejahatan yang disertai dengan kekerasan seperti halnya pembegalan, maka di perlukan pemahaman mengenai defenisi, teori dan konsep-konsep utama yang melandasi perilaku ataupun tindakan tersebut.

Kejahatan dan Begal

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang. kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain.

Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial (Nasaruddin 2016).

Menurut W.A. Bonger (1982), mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengesai kejahatan.

Sejalan dengan pendapat di atas, maka Arief (2003) juga mengemukakan bahwa kejatan merupakan perbuatan manusia yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Kejahatan adalah tindakan yang secara hukum dilarang dan diancam dengan pidana, yang meliputi berbagai jenis pelanggaran dan kekerasan. Muladi menekankan bahwa kejahatan adalah segala perbuatan yang secara moral dan

hukum dianggap tidak layak di dalam masyarakat (Muladi 2002).

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) begal diartikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal di artikan sebagai cara merompak atau merampas di jalan.

Kejahatan begal merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekpektasi. Dalam kenyataanya begal ialah salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat (Teradharana 2018).

Hamzah juga mengatakan bahwa begal adalah suatu perbuatan merampas atau merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Begal dikategorikan sebagai perbuatan kriminal berupa pencurian dengan kekerasan. Ia menekankan bahwa tindakan seperti ini termasuk dalam tindak pidana kekerasan bertujuan untuk merampas harta benda orang lain di tempat umum (Hamzah 2008).

Tindakan begal telah menjadi salah satu kejahatan yang sering terjadi di perkotaan maupun pedesaan dan dianggap sangat mengganggu ketertiban umum. Macam-macam teori yang terjadi dalam kejahatan sebagai berikut (Zaidan 2021):

1. Teori Kontrol Sosial. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi berkaitan dengan adanya kontrol dalam diri manusia. Sehingga jika seseorang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, maka dapat dengan mudah melakukan suatu tindakan kejahatan, sebaliknya, jika mampu menahan diri maka akan terbebas dari tindakan tersebut.
2. Teori Differential Association. Merupakan teori yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi setelah dilakukan beberapa interaksi kepada kelompok tertentu yang didalamnya dapat dilakukan pembelajaran dalam melakukan tindakan kejahatan.

3. Teori Strain. Teori ini menyatakan bahwa ketidakmampuan individu dalam mencapai tujuan hidup melalui cara-cara yang sah dapat menimbulkan keegangan atau strain, yang kemudian dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal sebagai alternatif. Dalam konteks pembegalan, individu yang mengalami tekanan ekonomi atau sosial mungkin merasa terpaksa melakukan pembegalan.

Tugas Pokok Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam

negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menunjang tinggi hak asasi manusia.”

Dalam melaksanakan perannya, kepolisian mempunyai tugas pokok yang dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, bersumber dari kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Menegakkan hukum, bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana KUHAP, KUHP dan Undang-Undang lainnya.

Tugas pokok kepolisian, tugas-tugas terperinci

dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikolog kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk melindungi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta

melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan Peran Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum yang dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan atau proses perwujudan ide-ide yang dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Syamsuddin 2008).

Soedjono Dirdjosisworo (1984) mengatakan fungsi penegak hukum ada tiga yaitu:

- a. Fungsi penegak hukum untuk mentertibkan dan

mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.

- b. Fungsi penegak hukum untuk memberikan saran sebagaibentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi penegak hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan

METODE

Penelitian yang kami lakukan adalah dengan pendekatan studi pustaka. Yang mana kami melakukan pendekatan dengan berbagai buku serta jurnal artikel ilmiah yang berhubungan dengan putusan pengadilan, jenis putusan pengadilan serta upaya hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

PEMBAHASAN

A. Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn

Pada putusan nomor 768/Pid.B/2024/pPN Mdn tersebut, terdapat seorang Terdakwa yang oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, dengan kronologi peristiwa yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama dengan M. Irfan dan bersama teman lainnya yang berjumlah kurang lebih 40 orang, tengah mengendarai sepeda motor di Jalan Datuk Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota

Medan. Saat itu terdakawa bersama rekan-rekannya yang berjumlah kurang lebih 40 orang sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan sambil membawa senjata tajam berupa celurit dan samurai bertemu di Jalan Datuk Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan korban Muhammad Andika (Alm) yang mengendarai 1 unit sepeda motor merk Honda CRF Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BK 5265 ALC dan tidak berboncengan sedangkan temannya Asbilal mengendarai sepeda motor jenis Satria FU berboncengan dengan Rifki Als Bajor lalu M. rinaldi diboncengn oleh Rahmansyah. Setelah pelaku dengan korban bertemu lalu M. Irfan mengejar korban dengan sepeda motor hingga korban terjatuh dari atas sepeda motornya lalu Chandra Syam Als Baim turun dari sepeda motor lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim menggunakan

sebuah ceurit warna kuning membacok sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian belakang badan korban Muhammad Andika lalu posisi korban Muhammad Andika sudah miring ke arah kiri namun korban Muhammad Andika masih berada di atas sepeda motor, lalu Satria Ompong turun dari sepeda motornya dan membacok bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai, kemudian MUHAMMAD ADRYANSYAH PUTRA HASIBUAN Alias IYAN langsung turun dari sepeda motor mengejar korban Muhammad Andika yang masih berada di atas sepeda motor dan tidak berdaya lagi, lalu anak Muhammad Adryansyah Putra Hasibuan Alias Iyan membacok bagian tangan kiri dengan menggunakan sebuah celurit sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Muhammad Andika oleng dan ingin menabrak teman dari Muhammad

Adriansyah Putra Hasibuan yang bernama Alfin Agus Winata Alias Dogol yang saat itu berjalan kaki, kemudian sepeda motor korban Muhammad Andika menabrak tembok rumah dan terjatuh ke aspal lalu Satria Ompong dan Kardo mengejar korban Muhammad Andika yang sudah tergeletak di aspal sedangkan temannya korban yang bernama M. Rinaldi mengalami luka parah bagian punggung belakang badannya dan Rahmansyah, Rifki als Bajor, ada Asbilal dapat melarikan diri. Selanjutnya akibat luka bacok dan tikaman dari terdakwa serta teman-temannya maka korban Muhammad Andika meninggal dunia.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Kejahatan Pembegalan

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang

terlibat dalam kejahatan pembegalan yakni:

- a. Faktor Sosial dan Ekonomi
 - 1) Kemiskinan: Salah satu faktor utama yang dapat memotivasi seseorang melakukan kejahatan pembegalan adalah kondisi ekonomi yang sulit. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak membuat individu mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, dan pembegalan sering kali dipandang sebagai jalan pintas.
 - 2) Ketimpangan Sosial: Ketidakadilan sosial dan ekonomi, seperti perbedaan kelas sosial yang mencolok, bisa mendorong individu merasa terasing dan marah, yang akhirnya mengekspresikan kekecewaan tersebut melalui tindakan kriminal.

- 3) Pengangguran:
Tingginya tingkat pengangguran juga berperan besar dalam meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal, termasuk pembegalan. Kurangnya peluang kerja bisa membuat individu lebih mudah tergoda untuk mencari pendapatan dari cara ilegal (Fitri, Arfa, and Erwin 2023).
- b. Faktor Psikologis dan Kepribadian
- 1) Pengaruh Lingkungan:
Lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau pengaruh teman sebaya yang tidak baik sering kali membentuk pola pikir dan perilaku seseorang. Anak-anak atau remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang sering terlibat dalam kejahatan bisa lebih rentan untuk melakukan tindakan kriminal.
 - 2) Kurangnya Pengendalian Diri: Beberapa individu mungkin memiliki kurangnya kontrol diri atau impulsif yang tinggi, sehingga lebih mudah terjerumus dalam kejahatan saat dihadapkan pada kesempatan.
 - 3) Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol:
Penyalahgunaan obat terlarang atau alkohol juga bisa menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindakan kriminal, termasuk pembegalan. Pengaruh dari zat-zat tersebut dapat mengurangi kesadaran dan pertimbangan moral, serta meningkatkan kecenderungan untuk melakukan tindakan agresif.
- c. Faktor Budaya dan Norma Sosial
- Norma Sosial yang Toleran terhadap Kekerasan: Di beberapa daerah, termasuk di perkotaan, norma sosial

yang membenarkan kekerasan atau balas dendam dapat menjadi pendorong bagi individu untuk melakukan kejahatan. Hal ini sering kali diperburuk oleh ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pemerintah Kota Medan dalam Menegakkan Hukum dan Penanggulangan Kasus Pembegalan

Penanggulangan kejahatan pembegalan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait antara lain:

a. Penegakan Hukum

- 1) **Penindakan Hukum Tegas:** Aparat kepolisian menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan pembegalan, termasuk penahanan,

penyelidikan yang cepat, dan peradilan yang adil. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa.

- 2) **Penggunaan Teknologi dalam Pemantauan:** Penggunaan teknologi canggih, seperti kamera pengawas dan pelacakan digital, menjadi bagian dari upaya polisi dalam memantau dan menangkap pelaku kejahatan.

b. Upaya Pemerintah Kota Medan

- 1) **Penyuluhan dan Program Edukasi:** Pemerintah Kota Medan, bersama dengan organisasi masyarakat dan lembaga terkait, sering mengadakan program edukasi dan penyuluhan tentang bahaya kriminalitas dan pentingnya kehidupan yang lebih baik. Hal ini

bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan dengan memperkenalkan alternatif yang lebih positif bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda.

- 2) PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT: Pemerintah juga berfokus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti menyediakan pelatihan kerja, program kewirausahaan, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan.

c. Pencegahan dan Pengurangan Faktor Penyebab

- 1) Pencegahan Dini di Sekolah: Program pencegahan kejahatan dilakukan sejak dini

melalui pendidikan di sekolah-sekolah, dengan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bahaya dan akibat dari tindakan kriminal, termasuk pembegalan. Sekolah juga bisa berperan dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak yang berisiko terlibat dalam kejahatan.

- 2) Penyuluhan dan Program Edukasi: Pemerintah Kota Medan, bersama dengan organisasi masyarakat dan lembaga terkait, sering mengadakan program edukasi dan penyuluhan tentang bahaya kriminalitas dan pentingnya kehidupan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan dengan memperkenalkan alternatif yang lebih positif bagi masyarakat,

- terutama bagi generasi muda.
- 3) PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT: Pemerintah juga berfokus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti menyediakan pelatihan kerja, program kewirausahaan, dan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan.
- d. Pencegahan dan Pengurangan Faktor Penyebab
- 1) Pencegahan Dini di Sekolah: Program pencegahan kejahatan dilakukan sejak dini melalui pendidikan di sekolah-sekolah, dengan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bahaya dan akibat dari tindakan kriminal, termasuk pembegalan. Sekolah juga bisa berperan dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak yang berisiko terlibat dalam kejahatan (Saputra 2024).
 - 2) Program Rehabilitasi bagi Pelaku Kriminal: Bagi mereka yang telah terlibat dalam kejahatan pembegalan, pemerintah juga melaksanakan program rehabilitasi untuk membantu pelaku keluar dari lingkaran kriminalitas dan mengembalikan mereka ke masyarakat dengan kemampuan hidup yang lebih baik (Hasdiwanti, Heryani, and Muin 2023).
- Kejahatan diartikan sebagai suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu

peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain (Gani et al. 2022).

Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tindak pidana kejahatan begal ini telah diatur didalam. KUHP Bab XXII pasal 365 KUHP ayat 1 “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap

tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri.” Ayat 2 “diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Ayat 3 “jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belastahun.” Ayat 4 “diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”⁵ Dengan bertujuan agar tindak pidana pencurian ini dapat diberantas dan diminimalisir setiap masa kemasa. Namun dalam kenyataannya walaupun sudah diatur didalam KUHP pasal 365 tersebut kejahatan begal ini masih saja tetap terjadi dan mengalami

kenaikan yg signifikan ditinjau dari jumlah kasus yang terjadi yaitu pada tahun 2015.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap **putusan nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn**, kasus ini melibatkan tindak pidana pembegalan yang berujung pada kematian korban Muhammad Andika. Tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa bersama sejumlah rekan lainnya dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit dan samurai. Pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada kronologi kejadian, peran masing-masing pelaku, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembegalan meliputi (1) Faktor Sosial dan Ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran, (2) Faktor Psikologis dan Kepribadian, seperti pengaruh lingkungan,

kurangnya pengendalian diri, serta penyalahgunaan narkoba dan alkohol, (3) Faktor Budaya dan Norma Sosial, seperti adanya toleransi terhadap kekerasan dalam lingkungan tertentu.

Pihak terkait dan Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan hukum dan menanggulangi kasus pembegalan, antara lain (1) Penegakan Hukum, dengan penindakan tegas terhadap pelaku dan pemanfaatan teknologi pemantauan, (2) Upaya Preventif, seperti penyuluhan, edukasi dini di sekolah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, (3) Program Rehabilitasi, untuk membantu para pelaku kriminal agar dapat kembali hidup bermasyarakat secara positif.

SARAN

1. Orangtua harus lebih memperhatikan kebutuhan anak dan memberikan kasih sayang yang ia butuhkan. Kalaupun pekerjaan menjadi

alasan orang tua kurang memberikan perhatian dan kasih sayang, sebaiknya anak bisa dititipkan ke kerabat yang lebih bisa menjaga dan merawat anak.

2. Sosialisasi sebagai upaya preventif sebaiknya tidak cukup dilakukan ke sekolah sekolah saja, tetapi bisa menysasar ke keluarga di setiap RW atau kelurahan, bersinergi dengan Bhabinkamtibmas untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan kejahatan. Pemasangan CCTV juga perlu dilakukan tidak hanya untuk menunjang kegiatan patroli, tetapi juga untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyadari bahwa penyusunan penelitian ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Jon Sarman

Saragih, SH, M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan hasil Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn serta memberikan bimbingan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Diterjemahkan Oleh R. A. Koesnoen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Alokoholisme Paparan Hukum Dan Kriminologi*. Bandung: CV Remadja Karya.
- Fitri, Adzra Salsabila, Nys. Arfa, and Erwin Erwin. 2023. "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4(3): 288–99.

- Gani, Ruslan Abdul, Nuraida Fitri Habi, Ardian Kurniawan, and Ferdiansyah Fa. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi)." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 1(2): 137–47.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasdiwanti, H, W Heryani, and A M Muin. 2023. "Kajian Teori Hukum Chaos Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar." *UNES Law Review* 5(4): 2599–2622. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/488%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/488/384>.
- Muladi. 2002. *Kejahatan Dan Penanggulangannya*. Bandung: PT Alumni.
- Nasaruddin, Ende Hasan. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rianto, Adi. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saputra, Joshua Raymond. 2024. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembegalan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 4(2): 135–51.
- Syamsuddin, Amir. 2008. *Integritas Penegak Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Teradharana, Yudika Tunggal. 2018. "Kamouflase Pelaku Kejahatan Begal Di Kota Surabaya." *Jurnal SI-Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*.
- Zaidan, Muhammad. 2021. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.